

PERNYATAAN SERIKAT BURUH SELATAN Global COP29

PENDANAAN IKLIM HARUS MEREBut KEMBALI DAN MEMULIHKAN ASET DAN LAYANAN PUBLIK



In English, [here](#)
En français, [ici](#)
En español, [aquí](#)
Em português, [aqui](#)

Kami adalah serikat pekerja yang mewakili lebih dari 100 juta pekerja dari Afrika, Asia, Amerika Latin, dan kawasan Karibia.

Sebagai serikat pekerja global Selatan, kami mendukung pendekatan *jalur publik* untuk mengatasi perubahan iklim, yang membutuhkan pergeseran kebijakan besar dari kebijakan "privatisasi untuk dekarbonisasi" saat ini menuju kerangka kerja pro-publik yang berani.

Kami menggemakan seruan yang dibuat oleh Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC), dan badan-badan regionalnya dari Afrika, Asia Pasifik, dan Amerika; Federasi Serikat Global

(Global Union Federations/GUF); dan badan-badan serikat buruh lainnya agar COP29 memberikan tingkat pendanaan iklim yang sepadan dengan, pertama, skala ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, dan, kedua, tanggung jawab historis Global North yang diakui di bawah UNFCCC.

Kami mendukung respon terhadap krisis iklim yang mempromosikan keadilan global dan menghormati serta melindungi hak-hak pekerja sebagaimana diuraikan dalam Program Kerja Transisi yang Adil (JTWP). Kami mendesak semua Pihak untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang efektif dan dapat ditindaklanjuti untuk memastikan transisi yang adil dan merata di Global South.

New Collective Quantified Goal (NCQG) dan Era Baru untuk Energi Publik

Kami menyerukan kepada para pihak dalam COP untuk mengakui peran penting kepemilikan dan kontrol publik atas sektor-sektor vital yang penting bagi aksi iklim dan transisi, seperti energi, transportasi publik, dan bahan baku. Seperti yang disebutkan dalam pernyataan Kongres Dunia Kelima ITUC yang diadopsi pada bulan November 2022, “Kebijakan iklim dan energi neoliberal ... yang terkait dengan privatisasi dan komodifikasi, telah gagal menghentikan peningkatan emisi gas rumah kaca.” Kongres tersebut menyerukan “retensi, reklamasi, dan perluasan kepemilikan publik atas infrastruktur dan layanan energi,” sebuah kebijakan yang kami dukung sepenuhnya. Kami juga mendukung tuntutan Konfederasi Serikat Buruh Amerika (TUCA) bahwa “energi harus didesakomodasi dan didemokratisasi melalui perubahan rezim kepemilikan dan manajemen, memperkuat karakter publik dan mengarahkan kembali peran perusahaan publik sehingga manajemen mereka demokratis dan fokus pada jaminan hak dan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi penduduk yang bekerja.” Selain itu, NCQG harus memastikan bahwa penyaluran semua pendanaan iklim dibentuk oleh mekanisme untuk memajukan kontrol publik, demokratis dan transparan, dan didasarkan pada pengakuan terhadap prinsip UNFCCC tentang Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbeda.

Oleh karena itu, pendanaan iklim harus disampaikan dengan cara yang dapat dilakukan:

1. Mencegah utang lebih lanjut, dan meringankan tekanan yang sangat besar dari utang yang ada, di negara-negara Selatan. Banyak negara Selatan yang sudah membayar lebih banyak untuk membayar utang dibandingkan dengan komitmen mereka untuk kesehatan, pendidikan dan layanan dasar. Pendanaan iklim harus mempertahankan dan memperluas layanan publik ini, yang sangat penting bagi upaya mitigasi dan adaptasi.
2. Mengakhiri kebijakan "pembiayaan campuran" dan "penghilangan risiko". Sejak COP15 pada tahun 2009, tingkat komitmen modal yang diberikan, pertama, sangat minim dan oleh karena itu tidak memadai, dan kedua, sebagian besar keuangan telah dimobilisasi oleh MDB dan oleh karena itu merupakan keuangan publik. Gagasan "miliaran hingga triliunan" Bank Dunia bahwa uang publik akan "mengkatalisasi" pembiayaan sektor swasta dalam jumlah besar telah gagal total. NCQG harus mengakui bahwa investor swasta tidak akan menyediakan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target iklim

dan energi rendah karbon, dan efektivitas pendanaan iklim akan bergantung pada lembaga publik dan pembiayaan publik.

3. Bergerak melampaui mekanisme pasar seperti penetapan harga dan perdagangan karbon (yang telah terbukti regresif secara sosial dan tidak efektif secara ekologis); dan pada akhirnya melihat lebih dari sekedar penggantian kerugian sebagai cara untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD dan REDD+). Seperti yang dicatat oleh pernyataan COP29 TUCA, kebijakan-kebijakan ini telah dipromosikan oleh "negara-negara Utara dan perusahaan transnasional untuk dikembangkan di negara-negara Selatan, memperdalam krisis dan mendorong reproduksi praktik-praktik kolonialisme, dengan mengabaikan tanggung jawab yang berbeda dari negara-negara Utara."
4. Menahan diri untuk tidak melakukan serangan terhadap sektor publik yang biasa dilakukan oleh Kemitraan Transisi Energi yang Adil. Proposal-proposal di masa depan tidak boleh menggunakan bahasa yang mendukung dan menampilkan kepentingan investor swasta. Sebaliknya, proposal tersebut harus menggunakan bahasa yang membahas masalah-masalah inti dari para pekerja, masyarakat, dan kebutuhan pembangunan yang sah di negara-negara Selatan
5. Mengizinkan dan mendorong pendekatan "reklamasi dan restorasi" terhadap layanan dan utilitas publik, serta membantu pemerintah negara-negara Selatan untuk mengembangkan aset dan kapasitas mereka, menempatkan mereka pada posisi yang lebih kuat untuk mengejar pembangunan industri dan sosial yang rendah karbon

Oleh karena itu tuntutan kami adalah sebagai berikut:

1. ***Negara-negara maju harus memenuhi tanggung jawab historis mereka:*** Mereka harus memberikan pendanaan iklim kepada negara-negara Selatan setidaknya sebesar \$5 triliun per tahun. Pendanaan iklim ini haruslah baru & tambahan, bersifat publik, tidak menimbulkan utang, memadai dan dapat diprediksi, serta disalurkan melalui mekanisme yang demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendanaan ini harus terdiri dari hibah dan bukan pinjaman untuk kerugian dan kerusakan akibat iklim, serta adaptasi iklim. Negara-negara maju juga harus membatalkan (bukan menjadwalkan ulang) utang yang terkait dengan iklim (misalnya utang untuk kerugian dan kerusakan infrastruktur, kegagalan panen yang penting, dll.) dan utang yang tidak sah untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi negara-negara Selatan untuk merespons krisis iklim. Baik pendanaan iklim maupun penghapusan utang dapat dianggap sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayarkan oleh negara-negara Utara kepada negara-negara Selatan atas tanggung jawab historis dan tanggung jawab mereka terhadap krisis iklim.
2. ***Pendanaan iklim harus digunakan untuk memperluas aset publik:*** Tidak seperti skema pendanaan campuran seperti Just Energy Transition Partnerships (JETP) yang menggunakan dana publik untuk mengurangi risiko investasi swasta sambil menumpuk utang pemerintah, komitmen tahunan sebesar \$5 triliun harus ditargetkan untuk

membangun kembali kapasitas pemerintah dalam mengambil alih kembali sektor listrik dan transportasi mereka menjadi milik dan kendali publik secara penuh.

Persyaratan-persyaratan tipe JETP yang ditujukan untuk menciptakan "lingkungan yang mendukung sektor swasta" melalui deregulasi, liberalisasi, dan pelemahan perusahaan-perusahaan publik harus memberi jalan kepada pendekatan "jalur publik" menuju transisi energi yang adil.

3. ***Mengatasi Kemiskinan Energi:*** Sistem pinjaman multilateral harus meninggalkan agenda "privatisasi untuk mengurangi karbon" dan secara terbuka mendukung pendekatan "merebut kembali dan memulihkan" perusahaan energi publik yang diusulkan oleh serikat pekerja yang mendukung jalur publik. MDB harus berhenti mendukung perusahaan swasta (seperti yang disebut sebagai produsen listrik independen, atau IPP) sementara bersikeras pada "pemulihan biaya penuh" untuk perusahaan publik. Dipelopori oleh Bank Dunia pada tahun 1980-an dan 1990-an, kebijakan "penyesuaian struktural" masih menjadi ciri khas skema pendanaan iklim saat ini, yaitu membuat pendanaan bergantung pada reformasi yang mendukung perusahaan swasta sambil berupaya melemahkan layanan dan entitas publik. Inilah alasan utama mengapa ratusan juta orang di negara-negara Selatan masih belum memiliki akses terhadap listrik yang bersih dan dapat diandalkan, dan miliaran orang masih bergantung pada sumber energi kotor untuk memasak dan menghangatkan ruangan.
4. ***Transfer teknologi diperlukan untuk industrialisasi hijau bernilai tambah tinggi dan pembangunan rendah karbon:*** Pendanaan tambahan harus diarahkan pada diversifikasi rantai pasokan global melalui transfer teknologi, bantuan teknis, dan kerja sama pemerintah dan swasta berbasis kemitraan publik-publik dengan persyaratan non-komersial. Industri hijau saat ini dikendalikan oleh segelintir negara dan perusahaan multinasional yang sering kali lebih mementingkan aliran pendapatan, keuntungan, dan pangsa pasar daripada mengatasi ancaman perubahan iklim.
5. ***Utara harus memimpin dalam penurunan penggunaan bahan bakar fosil yang terkelola.*** Fokus JETP untuk mengurangi penggunaan batu bara di negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan dan Vietnam menghindari kenyataan bahwa negara-negara kaya adalah produsen dan eksportir bahan bakar fosil utama. Negara-negara kaya dapat, dan seharusnya, memimpin dalam hal mengurangi tidak hanya konsumsi bahan bakar fosil mereka tetapi juga ekspor mereka. Hal ini harus dikombinasikan dengan memberikan bantuan kepada negara berkembang untuk mempercepat penyebaran alternatif energi rendah karbon, pendekatan mutakhir terhadap efisiensi energi, dan pengembangan infrastruktur dan praktik industri yang tahan terhadap perubahan iklim.

Melampaui Praktik Kolonial, Masa Depan yang Didorong oleh Masyarakat untuk Selatan

Kami percaya bahwa transisi yang adil dan merata membutuhkan reposisi strategis Global South dari bagian bawah rantai nilai global. Kami adalah mayoritas global. Kita adalah rumah bagi sebagian besar mineral strategis yang menjadi bahan bakar industri abad ke-21.

Kami menyerukan kepada pemerintah kami untuk membentuk kebijakan industri bersama Selatan-Selatan regional, dengan kerja sama Selatan-Utara untuk berbagi dan mentransfer teknologi yang menyelamatkan jiwa untuk memproduksi dan menggunakan energi terbarukan dan bentuk-bentuk energi rendah karbon lainnya, layanan dan infrastruktur transportasi umum modern, dll., dalam skala besar di Selatan Global. Kebijakan industri bersama ini harus terlebih dahulu menegosiasikan syarat dan ketentuan ekstraksi mineral yang adil secara sosial dan ramah lingkungan, distribusi yang adil dari rantai nilai di seluruh Dunia Selatan, serta pemerataan kemakmuran di masa depan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kebijakan industri hijau di negara-negara Selatan harus menghindari reproduksi hirarki, kekerasan, dan eksklusi sosial-ekonomi yang sama di masa lalu. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakui sentralitas pekerja dalam setiap proses produksi dan memastikan pemenuhan hak-hak dan kondisi kerja yang layak, serta melakukan pembiayaan sebagai sarana untuk mengubah model produksi dan konsumsi saat ini. Jika tidak ada perubahan radikal dalam model ekstraktif, eksploitatif, dan boros ini, target dekarbonisasi akan terus meleset jauh.

SERIKAT PEKERJA YANG BERGABUNG

1. ITUC - Africa
2. ITUC - Asia Pacific
3. Trade Union Confederation of the Americas (TUCA)
4. Public Services International (PSI)

Argentina

5. Asociacion del Personal de los Organismos de Control (APOC)
6. CNTI - CTA Autónoma
7. CTA Autónoma
8. Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE)
9. Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE)
10. FeTERA Fed. de Trab. de la Energía de la RA
11. Asociacion Fremial de Obreros y Empleados de la Conservación Ambiental (AGOEC-ARGENTINA)
12. FRENTE SINDICAL DE ACCION CLIMATICA (ARGENTINA)

Bangladesh

13. Paschimanchal Biddyt Bitaran Sramik Karmachari Union-PBBSKU

Benin

14. Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Benin)

Bolivia

15. Confederación Sindical de Trabajadores de Luz-Fuerza, Telecomunicaciones, Aguas, Gas y Jubilados de Bolivia (CSTLFTAGB)

Brazil

16. Central Única dos Trabalhadores CUT Brasil
17. Confederação Nacional dos Metalúrgicos - CNM-CUT

18. Federação Única dos Petroleiros
19. Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul
20. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Niterói- STIEEN
21. Temos que ter mobilização (logo needed)

Cambodia

22. Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia (BWTUC)

Chile

23. Central Untaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile (CUT-Chile)
24. Confederación de Trabajadores de Empresas del Estado
25. FESIMETRO - Chile

Colombia

26. Federación Sindical Mineroenergética Funtramiexco
27. SINEDIAN Sindicato de Empleados de la DIAN
28. SINTRACARBON
29. Sintra Emcali
30. SINTRAMINERALES
31. SNTT de Colombia
32. SUNET Colombia
33. Unión Sindical Obrera (USO)

Ecuador

34. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT)

Gabon

35. Gabonese Trade Union Confederation (COSYGA)

Ghana

36. Public Utility Workers' Union (PUWU) of TUC (Ghana)

India

37. AKILA INDIA KATTIDA THOLILALARGAL MATHIYA SANGAM (AIKTMS)
38. Hind Mazdoor Kisan Panchayat
39. Nagpur Municipal Corporation Employees Union
40. National Hawker Federation

Indonesia

41. Federasi Serikat Ederasi Serikat Pekerja Bandara/Federation of Indonesian Airport Workers' Unions (FSPBI)
42. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-Serbundo)
43. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES Reformasi)
44. Federasi Serikat Pekerja Mandiri
45. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)
46. Indonesian Media and Creative Industry Workers' Union for Democracy (SINDIKASI)
47. Persatuan Pegawai PT PLN Indonesia Power (PP-IP)
48. Serbuk Indonesia
49. Serikat Pekerja Kampus

- 50. Serikat Pekerja Kereta Api (SP KA)
- 51. Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI - CEMWU)
- 52. Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali (SP PJB)
- 53. Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ)
- 54. Solidaritas Pekerja CNN Indonesia
- 55. SP Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (SP PDAM Jakarta)
- 56. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Kenya

- 57. Central Organization of Trade Unions - Kenya (COTU-K)
- 58. Kenya Electrical Trades and Allied Workers Union (KETAWU)
- 59. Kenya Union of Water and Sewerage Employees (KUWASE)

Korea

- 60. Korean Confederation of Trade Unions (KCTU)
- 61. Korean Public Service and Transport Workers' Union (KPTU)

Malaysia

- 62. Timber Employees Union Peninsular Malaysia
- 63. Sabah Plantation Industry Employees Union
- 64. Sabah Timber Industry Employees Union

Mexico

- 65. SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTA (SME)
- 66. Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP)

Mozambique

- 67. Organização dos Trabalhadores de Moçambique (OTM)

Nepal

- 68. CLASS-Nepal
- 69. General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT)
- 70. Union of Trekking Travels Rafting Workers Nepal (UNITRAV)
- 71. UNI Global Union Nepal Liaison Council (UNI NLC)

Niger

- 72. Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN)
- 73. Syndicat National des Travailleurs de l'Énergie du Niger (SYNTRAVE)
- 74. Syndicat National des travailleurs des Mines (SYNTRAMIN)

Pakistan

- 75. All Pakistan United Irrigation Employees Federation (APUIEF)
- 76. Mehnat Kash Labour Federation
- 77. Pakistan Central Mines Labour Federation
- 78. Pakistan Brick Kilns Worker's Union
- 79. Textile Powerloom Garment Workers Union - Punjab
- 80. Labour Education Foundation (LEF)

Panama

81. Sindicato de trabajadores de la industria eléctrica y similares de Panamá (SITIESPA)

Peru

82. Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Peru (FENTAP)

83. Central Autónoma de Trabajadores del Perú

Philippines

84. Federation of Free Workers

85. Bukluran ng Manggagawang Pilipino - Solidarity of Filipino Workers (BMP)

86. Kapatiran ng mga Unyon at Samahang Manggagawa (KAPATIRAN)

87. Kapisanan ng mga Manggagawa sa GOCCs at GFIs (KAMAGGFI)

88. Kilusang Mayo Uno - May 1st Movement (KMU)

89. National Confederation of Labor

90. Philippine Independent Public Sector Employees Association (PIPSEA)

91. Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK)

92. Sentro

93. Teachers' Dignity Coalition

94. Labor United and Alliances (Lab-U All)

95. Workers for Just Transition (alliance)

Senegal

96. Democratic Union of Senegalese Workers (UDTS)

97. Syndicat National des Travailleurs du Pétrole du Gaz et des Activités Connexes du Sénégal /
SNTPGACS

Sierra Leone

98. Sierra Leone Labour Congress (SLLC)

South Africa

99. Congress of South African Trade Unions (COSATU)

100. South African Federation of Trade Unions - SAFTU

101. National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA)

Trinidad and Tobago

102. Oilfield Workers Trade Union (OWTU)

Tunisia

103. General Federation of Electricity and Gas-UGTT

Uruguay

104. Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE)

MENDUKUNG SEKUTU NGO GLOBAL SELATAN

1. Activiste climatique (Africa)
2. Amaclare Connect and Development Initiative (Africa)
3. Eco-citizenship Instigation (Africa)
4. Institutos de Estudos Estrategicos de Petroleo Gas Natural e Biocombustíveis (FUP-Brasil)
5. Quest For Growth and Development Foundation (Africa)



Ini adalah inisiatif TUED South yang bekerja sama dengan APMDD, PowerShift Africa, dan War on Want
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: TUEDglobal.org; apmdd.org; powershiftafrica.org; waronwant.org